

Judul : Donasi Rp 1.000 per hari, Pemda kok inisiasi, cukup fasilitasi aja
Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Donasi Rp 1.000 Per Hari

Pemda Kok Inisiasi, Cukup Fasilitasi Aja

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin menyoroti gagasan Pemda Jawa Barat gerakan berdonasi Rp 1.000 per hari pada 1 Oktober 2025. Uang yang terkumpul kabarnya akan digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan atau kesehatan warga Jawa Barat.

Khozin mengatakan, inisiatif penggalangan itu mestinya datang dari masyarakat, bukan dari Pemda. Selanjutnya, mekanismenya dikembalikan pada masyarakat sehingga bisa lebih transparan, partisipatif, dan tidak menimbulkan resistensi publik.

Penggalangan dana itu berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03/04/KESRA. Surat tersebut mengatur secara rinci pelaksanaan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) di wilayah Jawa Barat. "Pemda sebaiknya memfasilitasi gerakan sosial, bukan langsung mengelola atau

memungut dana," terang Khozin di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, inisiatif tersebut dinilai sah secara hukum. Dasar hukumnya tercantum di sejumlah aturan seperti Pasal 36 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 75 PP 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. "Secara normatif, tidak ada soal. Meski ketentuan ini jarang dilakukan Pemerintah dalam menggalang dana untuk kepentingan kesejahteraan sosial," ujarnya.

Menurutnya, pendekatan partisipatif lebih sesuai dengan semangat otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain mencegah kesalahpahaman publik, cara ini juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kegiatan sosial di daerahnya.

"Inisiatif dari masyarakat lebih baik semakin ditingkatkan dengan memfasilitasi dan berko-

laborasi dengan pemerintah daerah," jelas pengasuh Ponpes Al-Khozima, Jember itu.

Dia mengusulkan, Surat Edaran yang ditekun oleh Gubernur Jawa Barat itu ditinjau ulang, apalagi di tengah resistensi publik. Meski legal, penggalangan dana dari aspek sosiologis masyarakat dinilai kurang tepat.

"Sebaiknya, penggalangan dana dilakukan pihak di luar negara dengan tetap berpegang pada aturan seperti mekanisme penggalangan, distribusi, dan pelaporan," ujarnya.

Khozin meyakini, inisiasi yang muncul dari masyarakat jauh lebih efektif dan maksimal. Apalagi, Indonesia merupakan negara ranking 1 di dunia dalam indeks kedermawanan dunia (World Giving Index) sejak 2017 hingga 2024 lalu versi Charities Aid Foundation (CAF).

"Masyarakat Indonesia paling dermawan di dunia, biarkan itu

organik dari bawah. Negara memfasilitasi dan membuat regulasi agar spirit warga difasilitasi dengan baik," tuturnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan ulang gerakan berdonasi sebanyak Rp 1.000 per hari. Dia juga meminta agar kepala daerah tidak asal dalam membuat kebijakan.

"Bukan soal Kang Dedi ya, siapa pun gubernur, siapa pun bupati, wali kota tolong dipertimbangkan walaupun itu sifatnya kita sukarela untuk membuat kebijakan atau imbauan," kata anggota Fraksi Golkar itu.

Pemda, lanjutnya, masih memiliki banyak sumber penerimaan yang bisa dimaksimalkan, seperti pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan lain sebagainya. Sumber-sumber keuangan tersebut sebaiknya dikelola secara

profesional untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selanjutnya, maksimalkan pengelolaan sumber keuangan yang sudah diatur undang-undang itu. Dana tersebut bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai urusan pemerintah, karena hingga kini pengelolannya pun belum optimal.

Legislator asal Dapil Jatim III itu menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengakui banyak penerimaan negara yang bocor. Karena itu, kepala daerah kudu memperbaiki tata kelola penerimaan dan memaksimalkan pendapatannya untuk kepentingan masyarakat.

Dia yakin hal tersebut bisa lebih dimengerti oleh masyarakat karena itu memang tugas Pemerintah. "Karena itulah tidak perlu menambah beban yang lain. Sudah diberikan ruang untuk itu ya, manfaatkan betul apa yang sudah ada," tegasnya. ■ PVB